



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

Policy Feedback dalam Perumusan Program Makan Bergizi Gratis: Analisis Kesenjangan Antisipasi Dampak terhadap UMKM Kantin Sekolah

Angella Rosha Pangestu^{*1}, Sisman Prasetyo²

^{1,2}Ilmu Administrasi Publik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Email Corresponding: angella.rossha@uta45jakarta.ac.id

ARTICLE INFORMATION ABSTRACT

Article history:

Received date: 25 Agustus 2026

Revised date: 31 Agustus 2026

Accepted date: 2 September 2026

DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i2.6059>

The Free Nutritious Meals (MBG) program is a national policy aimed not only at improving nutritional intake but also at promoting economic empowerment through the involvement of micro, small, and medium enterprises (MSMEs). However, their involvement in MBG provision may reduce the market available to school canteen MSMEs that previously depended on student consumption. This study examines whether information on the impacts on school canteen MSMEs was utilized as *policy feedback* in the *policy learning* process prior to national implementation. The study employs a *systematic literature review* by synthesizing scholarly articles, academic books, government documents, regulations, and relevant publications from international organizations concerning MBG, school canteen MSMEs, *policy feedback*, and *policy learning*. The findings indicate that impacts on school canteen MSMEs had been identified during the pilot phase, particularly declining demand and income due to changes in students' consumption patterns. However, such *policy feedback* was not fully utilized as a basis for anticipatory *policy learning* before national implementation. Policy adjustments concerning MSMEs and school canteens became more evident only after implementation. These findings reveal a gap between *policy feedback*, *policy learning*, and policy design adjustment in the implementation of MBG.

Keywords: Free Nutritious Meals Program, *policy feedback*, *policy learning*, MSME, school canteens



This article is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRAKSI

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan nasional yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga mendorong pemberdayaan ekonomi melalui keterlibatan UMKM. Namun, pelibatan UMKM dalam penyediaan MBG berpotensi mengurangi pasar UMKM kantin sekolah yang sebelumnya bergantung pada konsumsi siswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan informasi mengenai dampak terhadap UMKM kantin sebagai *policy feedback* dalam proses *policy learning* sebelum implementasi nasional. Penelitian menggunakan pendekatan *systematic literature review* dengan mensintesis artikel ilmiah, buku akademik, dokumen pemerintah, regulasi, dan publikasi lembaga internasional terkait MBG, UMKM kantin sekolah, *policy feedback*, dan *policy learning*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak terhadap UMKM kantin telah teridentifikasi sejak fase uji coba, terutama berupa penurunan permintaan dan pendapatan akibat perubahan pola konsumsi siswa. Namun, *policy feedback* tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar *policy learning* untuk menghasilkan penyesuaian kebijakan secara antisipatif sebelum implementasi nasional. Penyesuaian terhadap posisi UMKM dan kantin lebih terlihat setelah implementasi berlangsung. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *policy feedback*, *policy learning*, dan penyesuaian desain kebijakan dalam implementasi MBG.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis, *policy feedback*, *policy learning*, UMKM, kantin sekolah

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu intervensi kebijakan nasional berskala besar yang mulai dilaksanakan secara bertahap mulai 6 Januari 2025. Sejak awal, pemerintah tidak memposisikan MBG semata-mata sebagai program pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga sebagai instrumen yang diharapkan menghasilkan dampak ekonomi melalui pengadaan bahan pangan dan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 secara eksplisit disebutkan bahwa pelaksanaan MBG melalui UMKM lokal diharapkan membentuk *backward and forward linkages*, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta menyerap sekitar 0,82 juta tenaga kerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Pada peluncuran program, Badan Gizi Nasional juga menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM merupakan salah satu dimensi program (Badan Gizi Nasional, 2025).

Namun, pelibatan UMKM dalam penyediaan MBG pada dasarnya dilakukan melalui pasar baru yang diciptakan oleh pemerintah, sedangkan UMKM kantin sekolah yang telah lebih dulu bergantung pada pola konsumsi siswa berpotensi mengalami *displacement*. Persoalan tersebut bukan semata-mata hipotesis yang baru diketahui setelah implementasi nasional. Hasil dari fase uji coba menunjukkan bahwa perubahan pola konsumsi siswa dan tekanan terhadap penjualan kantin telah muncul sebelum MBG diterapkan secara nasional.

Pada Desember 2024, pedagang UMKM kantin di SDN 15 Slipi dan SLBN 5 Slipi yang telah mengalami uji coba MBG selama sekitar satu bulan melaporkan penurunan omzet hingga 50 persen. Makanan berat yang sebelumnya menjadi komoditas utama tidak lagi terjual seperti sebelumnya (Rosalina et al., 2025). Dengan demikian, pada fase uji coba tersebut, sebenarnya telah teridentifikasi konsekuensi kebijakan, yakni pemberian makanan gratis dapat mempengaruhi pemasukan dan keberlanjutan UMKM kantin sekolah. Hal tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi aktor kebijakan untuk mempelajari bagaimana konsekuensi tersebut dapat ditangani sebelum program diperluas secara nasional. Dalam studi kebijakan publik, titik ini menjadi penting karena *pilot implementation* semestinya tidak hanya berfungsi sebagai tahap awal pelaksanaan, tetapi juga sebagai pembelajaran kebijakan (*policy learning*) sebelum dilakukan perluasan kebijakan.

Meskipun dampak terhadap kantin telah terlihat sebelum implementasi nasional, MBG tetap mulai dilaksanakan secara nasional pada 6 Januari 2025. Dalam perkembangan pelaksanaannya, telah bermunculan beberapa penelitian yang mengkaji tentang dampak pelaksanaan program MBG terhadap pendapatan dan keberlangsungan UMKM kantin sekolah. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Maulidya, dkk di Kabupaten Pringsewu yang menemukan bahwa terjadi penurunan pendapatan UMKM jajanan sekolah akibat perubahan pola konsumsi siswa (Maulidya et al., 2026). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Nurasyifah & Sumarsono, 2025 menunjukkan bahwa implementasi MBG membawa konsekuensi terhadap pengelolaan dan fungsi kantin sekolah menunjukkan bahwa implementasi MBG membawa konsekuensi terhadap pengelolaan dan fungsi kantin sekolah (Nurasyifah & Sumarsono, 2025). Sementara penelitian mengenai keberlangsungan keuangan kantin sekolah menemukan penurunan pendapatan dan tekanan terhadap arus kas setelah siswa mengurangi pembelian makanan utama di kantin (Rahmawati et al., 2026). Berdasarkan situasi tersebut, hubungan antara *feedback* dari fase uji coba program MBG dengan keputusan kebijakan pada tahap implementasi nasional menjadi hal menarik untuk dikaji.

Penelitian ini berupaya mengkaji masalah yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang banyak membahas mengenai apa yang terjadi akibat kebijakan seperti, perubahan pendapatan UMKM kantin, perubahan pola konsumsi siswa, strategi adaptasi pedagang, efektivitas implementasi, dan tata kelola layanan. Penelitian ini ingin mengkaji hal yang lebih mendasar apakah informasi yang dihasilkan dari fase uji coba yang berfungsi sebagai *policy feedback* dimanfaatkan oleh para aktor kebijakan untuk mendesain kebijakan, dalam rangka meminimalisir resiko dan kerugian sebelum kebijakan diimplementasikan secara

nasional. Dalam hal ini resiko dan kerugian yang layak diminimalisir ialah penurunan pendapatan yang signifikan bahkan keberlangsungan mata pencaharian bagi pedagang UMKM kantin sekolah.

Hal ini kemudian sejalan dengan perkembangan teori *policy feedback* yang memandang kebijakan bukan hanya sebagai keluaran proses politik, tetapi juga sebagai sumber konsekuensi yang dapat membentuk proses kebijakan pada periode berikutnya (Pierson, 1993). Dalam perspektif ini, kebijakan pada tahap awal dapat menghasilkan informasi, insentif, dan perubahan kondisi yang kemudian menjadi faktor dalam perkembangan kebijakan berikutnya. Literatur terbaru bahkan menempatkan keterhubungan antara kebijakan pada waktu sebelumnya dan kebijakan pada waktu berikutnya sebagai inti dari *policy feedback loop* (Béland et al., 2022). Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menguji apakah masalah yang telah terlihat sebelum perluasan kebijakan benar-benar menjadi bahan pembelajaran kebijakan dan penyesuaian kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) untuk mengidentifikasi dan mensintesis penelitian serta dokumen kebijakan mengenai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap UMKM kantin sekolah, *policy feedback*, dan *policy learning*. Data dikumpulkan melalui penelusuran artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, regulasi, dan dokumen resmi pemerintah menggunakan kata kunci terkait MBG, *school feeding*, UMKM kantin, *policy feedback*, dan *policy learning*. Sumber yang diperoleh diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya, kemudian didokumentasikan sesuai fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat aspek, yaitu dampak MBG terhadap UMKM kantin, *policy feedback* dari pelaksanaan kebijakan, respons atau penyesuaian kebijakan, dan *policy learning*. Temuan antar sumber kemudian dibandingkan dan disintesis untuk melihat apakah informasi dari fase uji coba telah digunakan dalam proses pembelajaran dan penyesuaian kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Dampak Kebijakan MBG terhadap UMKM Kantin Sekolah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejak awal dirancang dengan dua kepentingan kebijakan yang berjalan bersamaan, yaitu pemenuhan gizi dan penguatan ekonomi lokal. Dalam Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan MBG melalui UMKM lokal diharapkan membentuk *backward and forward linkages*, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyerap sekitar 0,82 juta tenaga kerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Orientasi tersebut sejalan dengan literatur *school feeding* yang menunjukkan bahwa program makanan sekolah dapat menjadi instrumen perlindungan sosial sekaligus penggerak ekonomi lokal apabila dikaitkan dengan sistem produksi dan pengadaan pangan lokal (Alderman & Bundy, 2012; Bundy et al., 2018; World Food Programme, 2024).

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa hubungan antara program makanan sekolah dan ekonomi lokal sangat dipengaruhi oleh desain pengadaan. Pengadaan dari produsen lokal dapat menciptakan permintaan yang stabil, memperluas pasar bagi pelaku usaha, dan menghasilkan multiplier effect dalam ekonomi lokal (Aurino et al., 2020; Galloway et al., 2023). Penelitian terbaru mengenai *home-grown school feeding* di Kenya, misalnya, menunjukkan bahwa pengeluaran program dapat menghasilkan dampak pendapatan yang luas bagi rumah tangga, usaha, petani, dan pedagang di sekitar sekolah (Taylor et al., 2025). World Bank (2026) dan Food and Agriculture Organization of the United Nations (2022) juga menempatkan pengadaan publik sebagai instrumen yang dapat menghubungkan permintaan institusi publik dengan produsen kecil serta memperkuat sistem pangan lokal.

Namun, temuan tersebut tidak berarti bahwa seluruh pelaku usaha memperoleh manfaat yang sama. UMKM yang masuk sebagai pemasok memperoleh pasar baru yang diciptakan pemerintah, sedangkan UMKM kantin sekolah telah lebih dahulu bergantung pada pasar konsumsi siswa terancam mengalami

displacement. Karena itu, perubahan pola konsumsi yang dihasilkan oleh MBG dapat menciptakan peluang bagi satu kelompok usaha sekaligus mengurangi pasar bagi kelompok usaha lainnya. Persoalan ini memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan kelompok lain yang akan terdampak dari penerapan suatu kebijakan, disamping kelompok sasaran utama.

Secara teoritis, kondisi tersebut sejalan dengan perspektif Schneider dan Ingram (1993, 1997) mengenai *target populations* dan desain kebijakan. Kelompok sasaran tidak hanya menentukan kepada siapa kebijakan diarahkan, tetapi juga mempengaruhi distribusi sumber daya, manfaat, dan beban yang dihasilkan oleh instrumen kebijakan. Howlett (2019) juga menekankan bahwa desain kebijakan merupakan proses pemilihan tujuan dan instrumen yang menghasilkan konsekuensi berbeda bagi kelompok yang berada dalam lingkungan kebijakan. Dengan demikian, pemerintah dapat secara eksplisit memasukkan UMKM dalam desain MBG tetapi tetap menghasilkan perlakuan yang berbeda terhadap UMKM berdasarkan posisi mereka dalam rantai penyediaan program.

Dari perspektif ini, posisi UMKM kantin menjadi penting. Mereka bukan kelompok usaha yang memperoleh pasar baru dari MBG, melainkan pelaku usaha yang sebelumnya telah memiliki pasar dan kemudian menghadapi perubahan terhadap pasar tersebut. Literatur mengenai program makanan sekolah juga menunjukkan bahwa perubahan lingkungan pangan sekolah dapat memengaruhi perilaku konsumsi dan ekosistem penjualan makanan di sekitar sekolah (Afridi, 2010; Jomaa et al., 2011; Drake et al., 2018). Oleh karena itu, potensi *displacement* terhadap kantin seharusnya dipandang sebagai salah satu konsekuensi kebijakan yang perlu diperhitungkan sejak tahap desain.

b. Policy Feedback dari Fase Uji Coba MBG

Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini menemukan bahwa telah teridentifikasi dampak terhadap UMKM kantin sebelum MBG dilaksanakan secara nasional, yakni pada saat fase pelaksanaan uji coba. Dokumentasi terhadap pelaksanaan uji coba pada Desember 2024 menunjukkan bahwa pedagang kantin di SDN 15 Slipi dan SLBN 5 Slipi mengalami penurunan omzet hingga sekitar 50 persen setelah sekitar satu bulan pelaksanaan program MBG. Penjualan makanan berat yang sebelumnya menjadi sumber utama pendapatan mengalami penurunan karena sebagian kebutuhan makanan siswa telah dipenuhi melalui program MBG (Rosalina et al., 2025).

Temuan tersebut memiliki arti penting dalam proses kebijakan. Pada titik tersebut, risiko terhadap kantin tidak lagi hanya berupa dugaan atau proyeksi. Telah terdapat pengalaman empiris dari pelaksanaan kebijakan dalam skala terbatas yang menunjukkan bahwa pemberian makanan gratis dapat mengubah perilaku konsumsi siswa dan berdampak pada pendapatan pedagang. Dengan kata lain, sebelum implementasi nasional telah tersedia *policy-relevant information* mengenai salah satu konsekuensi kebijakan.

Selanjutnya, pasca implementasi program MBG secara luas di tingkat nasional, kembali ditemukan dampak yang sama yang semakin memperkuat pola tersebut. Maulidya et al. (2026) menemukan bahwa UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu mengalami penurunan pendapatan akibat perubahan pola konsumsi siswa. Dampaknya lebih besar pada UMKM yang sangat bergantung pada konsumsi harian siswa, sementara pelaku usaha dengan produk yang lebih fleksibel relatif mampu beradaptasi. Rahmawati et al. (2026) juga menemukan penurunan pendapatan dan tekanan terhadap arus kas pengelola kantin setelah siswa mengurangi pembelian makanan utama di kantin. Nurasyifah dan Sumarsono (2025) menunjukkan bahwa MBG mengubah frekuensi pembelian siswa dan mendorong perubahan pengelolaan kantin di SMA Negeri 2 Malang. Penelitian Hermawati et al. (2025) menunjukkan adanya konflik kepentingan antara tujuan kebijakan pemerintah dan kepentingan ekonomi pedagang kantin, termasuk persoalan terbatasnya partisipasi pedagang dalam proses kebijakan. Siagian et al. (2026) bahkan menggunakan data 28 UMKM kantin sekolah untuk memprediksi pendapatan setelah penerapan MBG.

Dengan demikian, penelitian-penelitian setelah implementasi nasional tidak memperlihatkan fenomena yang sepenuhnya berbeda dari fase uji coba. Sebaliknya, beberapa studi memperlihatkan pola yang serupa, yaitu perubahan konsumsi siswa diikuti oleh tekanan terhadap pendapatan kantin. Evaluasi di SD

Negeri 1 Sukadanaham juga menemukan adanya konsekuensi sosial yang tidak direncanakan terhadap pedagang kantin meskipun program memberikan manfaat bagi kesiapan dan motivasi belajar siswa (Lubis et al., 2025). Temuan tersebut memperkuat posisi UMKM kantin sebagai aktor yang terdampak oleh perubahan desain lingkungan pangan sekolah.

Dalam kerangka *policy feedback*, konsekuensi tersebut dapat dipahami sebagai umpan balik yang dihasilkan oleh kebijakan. Pierson (1993) menjelaskan bahwa kebijakan menghasilkan konsekuensi yang dapat menyediakan sumber daya, insentif, informasi, dan interpretasi bagi aktor dalam proses kebijakan. Pierson (1992) sebelumnya juga menunjukkan bahwa konsekuensi kebijakan dapat memengaruhi dinamika kebijakan pada periode berikutnya. Mettler dan Soss (2004) serta Mettler dan SoRelle (2018) memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa kebijakan dapat membentuk pengalaman dan persepsi aktor yang kemudian berpengaruh terhadap politik dan *policy making*. Moynihan dan Soss (2014) memperlihatkan bahwa efek kebijakan juga dapat terbentuk melalui praktik administrasi dan hubungan antara aktor pemerintah dengan kelompok yang terdampak.

c. *Policy Learning* dalam Perumusan Kebijakan MBG

Keberadaan *policy feedback* tidak otomatis menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan *policy learning*. Heclo (1974) sejak awal menempatkan pembelajaran sebagai bagian dari proses perubahan kebijakan, sedangkan Bennett dan Howlett (1992) menunjukkan bahwa informasi dan pengalaman dapat menjadi sumber perubahan kebijakan tetapi tidak selalu menghasilkan perubahan dengan sendirinya. Dunlop dan Radaelli (2013) kemudian memberikan kerangka yang lebih sistematis dengan menempatkan *policy learning* pada proses bagaimana pengetahuan dibangun dan digunakan oleh aktor kebijakan.

Karena itu, penelitian ini membedakan antara tiga kondisi. Pertama, *feedback* tersedia, yaitu konsekuensi kebijakan telah diketahui. Kedua, *policy learning* terjadi, yaitu informasi tersebut digunakan untuk memahami kembali persoalan atau mengevaluasi kebijakan. Ketiga, *learning* diterjemahkan ke dalam kebijakan, yaitu pembelajaran menghasilkan penyesuaian instrumen, mekanisme, atau desain. Perbedaan tersebut penting karena keberadaan informasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemerintah menggunakannya.

Dunlop dan Radaelli (2018a) menunjukkan bahwa *policy learning* dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelusuri siapa yang belajar, apa yang dipelajari, dan bagaimana pembelajaran berhubungan dengan proses kebijakan. Mereka juga menekankan bahwa pembelajaran tidak berlangsung secara otomatis. Dalam kajian berikutnya, Dunlop dan Radaelli (2018b) menunjukkan bahwa pembelajaran dapat memiliki pemicu dan hambatan yang berbeda, serta dapat menghasilkan pembelajaran yang keliru atau disfungsional. Hall (1993) menunjukkan bahwa pembelajaran juga memiliki tingkat kedalaman yang berbeda, mulai dari perubahan instrumen sampai perubahan tujuan dan paradigma kebijakan. Rose (1991) melalui konsep *lesson-drawing* menjelaskan bahwa pengalaman kebijakan dapat menjadi sumber pelajaran untuk pilihan kebijakan berikutnya.

Hasil temuan menemukan bahwa pemerintah memang melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap program MBG, tetapi hal tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa proses pembelajaran kebijakan berlangsung secara memadai, responsif, atau berbasis pada seluruh kelompok yang terdampak. Pemerintah membentuk mekanisme koordinasi lintas kementerian/lembaga melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025, yang antara lain menempatkan penguatan ekonomi lokal sebagai bagian dari penyelenggaraan MBG (Republik Indonesia, 2025a). Pemerintah juga kemudian menetapkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengenai tata kelola MBG yang memperkuat aspek penyelenggaraan, monitoring, pengawasan, evaluasi, dan pengadaan (Republik Indonesia, 2025b). Badan Gizi Nasional juga menyatakan adanya upaya memperkuat keterlibatan koperasi dan UMKM dalam rantai pasok program untuk mendukung ekonomi lokal (Badan Gizi Nasional, 2025b). Namun, keberadaan regulasi, mekanisme koordinasi, dan pernyataan kelembagaan tersebut belum cukup untuk menunjukkan bahwa kepentingan UMKM kantin telah benar-benar terintegrasi dalam desain dan pelaksanaan kebijakan. Secara khusus, belum

terlihat bukti yang memadai bahwa pemerintah melakukan evaluasi dampak terhadap kantin secara sistematis, menyediakan mekanisme mitigasi yang jelas, atau memastikan bahwa UMKM kantin memperoleh akses yang setara terhadap peluang ekonomi yang diciptakan oleh program.

Perkembangan regulasi tersebut karena itu tidak dapat langsung dibaca sebagai bukti bahwa *policy learning* telah berlangsung secara efektif. Perubahan tata kelola dapat mencerminkan proses pembelajaran, tetapi juga dapat bersifat administratif dan berorientasi pada penguatan kapasitas implementasi tanpa menyentuh persoalan distribusional yang dialami kelompok terdampak. Dalam kasus UMKM kantin, persoalan utamanya bukan hanya apakah pemerintah melakukan penyesuaian, melainkan apakah penyesuaian tersebut mengakui dan merespons risiko hilangnya pendapatan, berkurangnya pelanggan, serta tersingkirnya kantin dari ekosistem ekonomi sekolah. Dampak tersebut telah teridentifikasi sebelum implementasi nasional, tetapi bukti mengenai adanya perubahan desain yang secara khusus mencegah atau mengurangi *displacement* terhadap kantin masih terbatas

d. Kesenjangan Antisipasi dalam Desain Kebijakan MBG

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan temporal antara munculnya *policy feedback* dan penyesuaian kebijakan. Pada fase uji coba, masalah kantin telah terlihat. Namun MBG tetap memasuki implementasi nasional pada 6 Januari 2025. Setelah itu, penelitian di berbagai lokasi kembali menemukan tekanan terhadap pendapatan dan keberlangsungan kantin (Maulidya et al., 2026; Rahmawati et al., 2026; Nurasyifah & Sumarsono, 2025). Pola tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai dampak yang sudah tersedia sebelum implementasi nasional belum menghasilkan mitigasi yang cukup untuk mencegah masalah serupa muncul kembali.

Hal ini merupakan salah satu wujud kesenjangan antisipasi dalam desain kebijakan. OECD (2020) menempatkan *ex ante impact assessment* sebagai proses yang seharusnya membantu pemerintah mengidentifikasi manfaat, biaya, kelompok terdampak, serta konsekuensi langsung maupun tidak langsung. OECD (2021) juga menekankan pentingnya penggunaan *evidence* dalam seluruh siklus regulasi. OECD (2025) kembali menyoroti bahwa analisis agregat dapat menyembunyikan distribusi dampak di antara kelompok yang berbeda. Bagi kebijakan yang mempengaruhi usaha kecil, hal tersebut menjadi penting karena dampak terhadap kelompok usaha kecil dapat berbeda secara signifikan berdasarkan posisi dan kapasitas usaha.

Dalam konteks MBG, pemerintah telah melakukan analisis terhadap dimensi ekonomi program. Namun, orientasi tersebut terutama terlihat dalam framing UMKM sebagai pemasok dan penerima manfaat dari pasar baru yang diciptakan MBG (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024; Nurlaili, 2025). Penelitian Kelara et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa UMKM yang menjadi vendor resmi MBG memperoleh dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan stabilitas keuangan rumah tangga. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa desain MBG memang dapat menghasilkan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha yang terintegrasi dalam sistem penyediaan.

Masalahnya adalah, posisi UMKM kantin bukan merupakan pemasok yang menerima permintaan baru, melainkan pelaku usaha existing yang berada pada pasar yang sebagian permintaannya kemudian digantikan oleh intervensi pemerintah. Ketika kedua kelompok sama-sama disebut “UMKM”, distribusi dampak yang berbeda menjadi kurang terlihat. Dengan demikian, kesenjangan kebijakan bukan terletak pada ketiadaan perhatian terhadap UMKM, tetapi pada ketidakcukupan diferensiasi terhadap posisi UMKM dalam ekosistem kebijakan MBG.

Perspektif ini sejalan dengan Schneider dan Ingram (1993, 1997) yang menekankan bahwa cara pemerintah mengkonstruksi kelompok sasaran berpengaruh terhadap desain instrumen dan distribusi manfaat serta beban. Perspektif *policy design* Howlett (2019) juga menekankan bahwa instrumen harus disesuaikan dengan konteks, target, dan mekanisme kausal kebijakan. Cairney dan Heikkila (2014) serta Weible dan Sabatier (2018) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh informasi, tetapi

juga oleh aktor, institusi, kepentingan, ide, dan kondisi lingkungan kebijakan. Dengan demikian, tersedianya informasi tentang kantin tidak menjamin bahwa informasi tersebut akan menjadi prioritas dalam desain.

Persoalan ini juga dapat dijelaskan melalui konsep *policy inaction*. McConnell dan 't Hart (2019) menjelaskan bahwa *inaction* tidak selalu berarti pemerintah tidak melakukan apa pun, tetapi dapat terjadi ketika pemerintah tidak mengambil tindakan tertentu meskipun terdapat alternatif yang tersedia. Dalam kasus MBG, pemerintah melakukan *policy action* dengan melanjutkan program dan memperluas implementasinya. Pada saat yang sama, pada aspek tertentu terdapat kemungkinan *policy inaction*, yakni tidak melakukan penyesuaian yang memadai terhadap risiko displacement kantin sebelum implementasi nasional. Perbedaan ini penting untuk menjaga analisis tetap berfokus pada aspek kebijakan yang dapat diamati. Penelitian ini tidak membahas motif atau intensi pembuat kebijakan, melainkan menelaah hubungan antara temuan pada fase uji coba, keputusan implementasi nasional, dan dampak yang muncul terhadap UMKM kantin. Berdasarkan temuan, analisis diarahkan pada konsekuensi kebijakan serta kesesuaian desain dan proses pembelajarannya.

Dari sudut pandang *policy feedback*, situasi tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *negative* atau *self-undermining feedback*. Jacobs dan Weaver (2015) menjelaskan bahwa kebijakan dapat menghasilkan konsekuensi yang kemudian menciptakan tekanan untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan itu sendiri. Weaver (2010) juga menunjukkan bahwa umpan balik negatif dapat menciptakan tekanan yang pada akhirnya mendorong perubahan atau pembalikan kebijakan.

Dalam kasus MBG, tekanan tersebut belum menghasilkan pembatalan program. Sebaliknya, respons kebijakan berkembang menuju penataan ulang tata kelola dan penguatan hubungan dengan pelaku usaha lokal. Bahkan pada 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan panduan yang secara eksplisit menempatkan kantin sekolah dalam ekosistem MBG, termasuk pengaturan jam operasional kantin dan pendampingan pedagang di sekitar sekolah untuk menyediakan makanan alternatif yang sehat (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2026). Perkembangan ini menunjukkan bahwa posisi kantin baru memperoleh perhatian setelah MBG berjalan dalam waktu yang cukup lama dan dampak ekonominya terhadap pelaku usaha mulai terlihat secara luas. Dengan kata lain, penyesuaian desain kebijakan tidak dilakukan sejak tahap awal ketika pemerintah masih memiliki kesempatan untuk mematangkan skema implementasi dan mengantisipasi potensi kerugian, melainkan muncul secara reaktif setelah konsekuensi negatif terlanjur dialami oleh UMKM kantin.

Dengan demikian, pola yang ditemukan lebih tepat disebut *delayed policy learning*. pemerintah tidak sepenuhnya gagal belajar, tetapi pembelajaran dan penyesuaian terhadap posisi kantin berlangsung terlambat, setelah implementasi nasional berjalan dan menimbulkan kerugian ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak melakukan koreksi terhadap dampak yang telah terjadi daripada memanfaatkan informasi dari fase uji coba untuk menyempurnakan desain kebijakan sejak awal.

e. Policy Feedback, Policy Learning, dan Implementasi Nasional MBG

Fase uji coba sejatinya telah menghasilkan informasi mengenai perubahan pola konsumsi dan tekanan terhadap pendapatan kantin. Informasi tersebut memiliki relevansi langsung terhadap keberlanjutan UMKM kantin karena kelompok usaha tersebut bergantung pada konsumsi siswa sebagai sumber permintaan. Pada saat yang sama, literatur global mengenai *school feeding* menunjukkan bahwa program makanan sekolah memang dapat menciptakan dampak ekonomi melalui pengadaan lokal, tetapi desain pengadaan menentukan distribusi manfaatnya (Alderman & Bundy, 2012; Aurino et al., 2020; Galloway et al., 2023; World Food Programme, 2024). Bukti dari Kenya bahkan menunjukkan bahwa program *home-grown school feeding* dapat menghasilkan multiplier ekonomi yang kuat bagi wilayah lokal ketika hubungan antara program dan ekonomi lokal sengaja dibangun (Taylor et al., 2025). Temuan ini memperkuat bahwa dimensi ekonomi dalam kebijakan makanan sekolah bukan isu tambahan, melainkan bagian dari desain kebijakan itu sendiri.

Karena itu, keberadaan risiko terhadap UMKM kantin semestinya tidak dipahami sebagai konsekuensi yang sepenuhnya terpisah cakupan kebijakan. Literatur *policy feedback* menunjukkan bahwa

konsekuensi kebijakan dapat menyediakan informasi bagi perkembangan kebijakan berikutnya (Pierson, 1993; Béland & Schlager, 2019). Literatur *policy learning* menunjukkan bahwa informasi tersebut kemudian perlu digunakan oleh aktor kebijakan agar menjadi pembelajaran yang bermakna (Dunlop & Radaelli, 2013, 2018a). Sementara itu, literatur *policy design* menegaskan bahwa pembelajaran tersebut perlu diterjemahkan ke dalam instrumen dan desain yang sesuai (Schneider & Ingram, 1997; Howlett, 2019).

Dalam kasus MBG, informasi tentang dampak terhadap UMKM kantin sebenarnya sudah tersedia. Namun, informasi tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk mencegah risiko bagi UMKM kantin sebelum MBG diterapkan secara nasional. Penyesuaian kebijakan baru terlihat setelah muncul lebih banyak bukti dan pengalaman selama pelaksanaan. Jadi, penelitian ini tidak menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak belajar dari kebijakan, tetapi menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang tersedia (*policy feedback*), proses pembelajaran kebijakan (*policy learning*), dan waktu penyesuaian kebijakan (*timing of policy adjustment*).

Temuan tersebut juga memperluas literatur MBG yang selama ini lebih banyak berfokus pada hasil kebijakan. Studi mengenai dampak ekonomi UMKM kantin, studi mengenai peluang ekonomi UMKM vendor, serta penelitian mengenai implementasi MBG telah memperkaya pengetahuan mengenai *policy outcomes* (Hermawati et al., 2025; Maulidya et al., 2026; Nurasyifah & Sumarsono, 2025; Rahmawati et al., 2026; Siagian et al., 2026; Kelara et al., 2025; Nurlaili, 2025). Namun, penelitian ini menggeser perhatian pada bagaimana *policy outcomes* tersebut seharusnya kembali masuk ke proses kebijakan.

Policy consequence menjelaskan apa yang terjadi akibat kebijakan. *Policy feedback* menjelaskan bagaimana konsekuensi tersebut menghasilkan informasi dan tekanan bagi proses kebijakan berikutnya. *Policy learning* menjelaskan apakah informasi tersebut benar-benar dipahami dan digunakan oleh aktor kebijakan. *Policy adjustment* kemudian menjadi bukti bahwa pembelajaran tersebut diterjemahkan ke dalam perubahan kebijakan.

Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama yang terjadi terletak pada *anticipatory policy-design gap*, yaitu kondisi ketika konsekuensi kebijakan yang telah teridentifikasi belum diterjemahkan secara memadai menjadi mitigasi sebelum kebijakan diperluas secara nasional. Temuan tersebut sekaligus memberikan kritik terhadap desain implementasi MBG. Kritiknya bukan terhadap tujuan program untuk meningkatkan gizi siswa, karena bukti internasional secara konsisten menunjukkan bahwa *school feeding* dapat memberikan manfaat kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial (Wang et al., 2021; Jomaa et al., 2011; World Food Programme, 2024). Kritik diarahkan pada kemampuan desain kebijakan untuk mengantisipasi distribusi biaya dan manfaat di antara aktor yang berbeda.

Dengan demikian, keberhasilan MBG sebagai kebijakan publik tidak cukup diukur berdasarkan jumlah penerima manfaat, peningkatan akses makanan bergizi, atau kontribusi ekonomi agregat. Keberhasilan juga perlu dinilai berdasarkan kemampuan pemerintah mengenali konsekuensi kebijakan terhadap kelompok yang sudah berada dalam ekosistem kebijakan, menggunakan feedback dari fase awal, dan melakukan penyesuaian sebelum konsekuensi tersebut meluas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa dampak terhadap UMKM kantin sekolah telah teridentifikasi sejak fase uji coba MBG, terutama melalui perubahan pola konsumsi siswa dan penurunan pendapatan pedagang. Informasi tersebut dapat dipahami sebagai *policy feedback* yang seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi aktor kebijakan sebelum MBG diterapkan secara nasional. Namun, hasil sintesis menunjukkan bahwa *policy feedback* tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar *policy learning* untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko terhadap UMKM kantin melalui penyesuaian desain kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *policy feedback* dan *policy learning* dalam perumusan MBG. Pembelajaran kebijakan memang berlangsung melalui evaluasi, penyesuaian tata kelola, dan perkembangan kebijakan setelah implementasi, tetapi cenderung bersifat reaktif

setelah dampak kembali muncul. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan MBG lebih tepat dipahami sebagai kesenjangan antisipasi dalam desain kebijakan, yaitu belum optimalnya pemanfaatan pengalaman fase uji coba sebagai dasar penyesuaian kebijakan sebelum implementasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridi, F. (2010). Child welfare programs and child nutrition: Evidence from a mandated school meal program. *Journal of Development Economics*, 92(2), 152–165. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2009.02.002>
- Alderman, H., & Bundy, D. (2012). School feeding programs and development: Are we framing the question correctly? *The World Bank Research Observer*, 27(2), 204–221. <https://doi.org/10.1093/wbro/lks003>
- Aurino, E., Gelli, A., Adamba, C., Osei-Akoto, I., & Alderman, H. (2020). Food for thought? Experimental evidence of an integrated nutrition-sensitive agriculture intervention on school meals, nutrition and local markets. *World Development*, 126, 104726. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104726>
- Badan Gizi Nasional. (2025a). *BGN akan memulai program MBG secara bertahap*. Badan Gizi Nasional.
- Badan Gizi Nasional. (2025b, March 19). *Koperasi dan UMKM jadi mitra strategis MBG*. Badan Gizi Nasional.
- Bennett, C. J., & Howlett, M. (1992). The lessons of learning: Reconciling theories of policy learning and policy change. *Policy Sciences*, 25(3), 275–294.
- Béland, D., & Schlager, E. (2019). Varieties of policy feedback research: Looking backward, moving forward. *Policy Studies Journal*, 47(2), 184–205. <https://doi.org/10.1111/psj.12340>
- Birkland, T. A. (2019). Agenda setting and the policy process: Focusing events. In *Oxford Research Encyclopedia of Politics*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.165>
- Bundy, D. A. P., de Silva, N., Horton, S., Jamison, D. T., & Patton, G. C. (Eds.). (2018). *Re-imagining school feeding: A high-return investment in human capital and local economies*. World Bank.
- Cairney, P., & Heikkilä, T. (2014). A comparison of theories of the policy process. In P. A. Sabatier & C. M. Weible (Eds.), *Theories of the policy process* (3rd ed., pp. 363–390). Westview Press.
- Dewey, J. (1927). *The public and its problems*. Henry Holt.
- Dolowitz, D. P., & Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–24. <https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121>
- Drake, L., Fernandes, M., Aurino, E., Kiamba, J., Giyose, B., Burbano, C., Alderman, H., Mai, L., & Gelli, A. (2018). School feeding programs in middle childhood and adolescence. In D. A. P. Bundy et al. (Eds.), *Re-imagining school feeding: A high-return investment in human capital and local economies* (pp. 135–152). World Bank.
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2013). Systematising policy learning: From monolith to dimensions. *Political Studies*, 61(3), 599–619. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2012.00982.x>
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2018a). Does policy learning meet the standards of an analytical framework of the policy process? *Policy Studies Journal*, 46(S1), S48–S68. <https://doi.org/10.1111/psj.12250>
- Dunlop, C. A., & Radaelli, C. M. (2018b). The lessons of policy learning: Types, triggers, hindrances and pathologies. *Policy & Politics*, 46(2), 255–272. <https://doi.org/10.1332/030557318X15230059735521>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2022). *Public food procurement for sustainable food systems and healthy diets*. FAO.
- Galloway, C., Devine, S., Parison, J., & Jones, H.-A. (2023). Procurement from local producers for food service in primary and secondary school settings: A scoping review. *Health Promotion Journal of Australia*, 34(2), 316–327. <https://doi.org/10.1002/hpja.618>
- Hall, P. A. (1993). Policy paradigms, social learning, and the state: The case of economic policymaking in Britain. *Comparative Politics*, 25(3), 275–296.

- Heclo, H. (1974). *Modern social politics in Britain and Sweden: From relief to income maintenance*. Yale University Press.
- Hermawati, L., Abdullah, M. N. A., & Rizaldi, M. R. (2025). Dampak kebijakan Makan Bergizi Gratis pada pedagang kantin: Sebuah analisis teori konflik Max Weber. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.D), 155–160.
- Howlett, M. (2019). *Designing public policies: Principles and instruments* (2nd ed.). Routledge.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2009). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Jacobs, A. M., & Weaver, R. K. (2015). When policies undo themselves: Self-undermining feedback as a source of policy change. *Governance*, 28(4), 441–457.
- Jomaa, L. H., McDonnell, E., & Probart, C. (2011). School feeding programs in developing countries: Impacts on children's health and educational outcomes. *Nutrition Reviews*, 69(2), 83–98. <https://doi.org/10.1111/j.1753-4887.2010.00369.x>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota keuangan beserta rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2026). *Kantin di satuan pendidikan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kelara, B. N., Siregar, T. R. Y., Febrianti, R., Mardyaningsih, W., Ghozali, A., & Rinandy, A. A. (2025). Program Makan Bergizi Gratis dan kesejahteraan pekerja UMKM: Peran penyerapan SDM dan kondisi keuangan rumah tangga di Palembang. *Jembatan: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Auditing dan Akuntansi*, 10(2). <https://doi.org/10.54077/jembatan.v10i2.247>
- Liguori, J., et al. (2024). How do publicly procured school meals programmes in sub-Saharan Africa improve nutritional outcomes for children and adolescents: A mixed-methods systematic review. *Public Health Nutrition*.
- Lubis, M. K., Dismawan, M. F., Hapsari, S. P., Rosidin, U., & Handoko. (2025). Evaluasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 1 Sukadanaham. *Didaktika Dwija Indria*, 13(6).
- Maulidya, A., Yulianto, Y., & Kusuma, Y. T. (2026). Dampak implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis terhadap ekonomi mikro di lingkungan sekolah: Studi kasus UMKM jajanan sekolah di Kabupaten Pringsewu Lampung. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 10(1), 602–614.
- McConnell, A., & 't Hart, P. (2019). Inaction and public policy: Understanding why policymakers “do nothing.” *Policy Sciences*, 52(4), 645–661. <https://doi.org/10.1007/s11077-019-09362-2>
- Mettler, S., & SoRelle, M. (2018). Policy feedback theory. In C. M. Weible & P. A. Sabatier (Eds.), *Theories of the policy process* (4th ed., pp. 103–134). Routledge.
- Mettler, S., & Soss, J. (2004). The consequences of public policy for democratic citizenship: Bridging policy studies and mass politics. *Perspectives on Politics*, 2(1), 55–73. <https://doi.org/10.1017/S1537592704000623>
- Moynihan, D. P., & Soss, J. (2014). Policy feedback and the politics of administration. *Public Administration Review*, 74(3), 320–332. <https://doi.org/10.1111/puar.12200>
- Nurlaili, Y. (2025). Peluang Program Makan Bergizi Gratis dalam mendorong pertumbuhan UMKM pangan dan penguatan ekonomi kerakyatan. *Journal Financial, Business and Economics*, 3(2).
- Nurasyifah, N., & Sumarsono, R. B. (2025). Dampak kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap manajemen layanan khusus kantin di SMA Negeri 2 Malang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 35176–35183. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33672>
- OECD. (2020). *Regulatory impact assessment*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/7a9638cb-en>
- OECD. (2021). *OECD regulatory policy outlook 2021*. OECD Publishing.
- OECD. (2025). *OECD regulatory policy outlook 2025*. OECD Publishing.

- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Patashnik, E. M. (2008). *Reforms at risk: What happens after major policy changes are enacted*. Princeton University Press.
- Pierson, P. (1992). "Policy feedbacks" and political change: Contrasting Reagan and Thatcher's pension-reform initiatives. *Studies in American Political Development*, 6(2), 359–390.
- Pierson, P. (1993). When effect becomes cause: Policy feedback and political change. *World Politics*, 45(4), 595–628. <https://doi.org/10.2307/2950710>
- Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. *American Political Science Review*, 94(2), 251–267.
- Rahmawati, S., Ilfa, F., & Sijabat, R. (2026). Eksistensi keuangan kantin sekolah pasca kehadiran Program Makan Bergizi Gratis (MBG). *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 4(1), 156–169. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v4i1.1817>
- Republik Indonesia. (2025a). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*.
- Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis*.
- Rosalina, M. P., Pratama P., R. A. K., & Justiar, M. P. J. (2025, January 19). *Jalan terjal meliput Makan Bergizi Gratis*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/jalan-terjal-meliput-makan-bergizi-gratis>
- Rose, R. (1991). What is lesson-drawing? *Journal of Public Policy*, 11(1), 3–30.
- Sabatier, P. A. (1988). An advocacy coalition framework of policy change and the role of policy-oriented learning therein. *Policy Sciences*, 21(2–3), 129–168.
- Sabatier, P. A., & Jenkins-Smith, H. C. (Eds.). (1993). *Policy change and learning: An advocacy coalition approach*. Westview Press.
- Schneider, A. L., & Ingram, H. (1993). Social construction of target populations: Implications for politics and policy. *American Political Science Review*, 87(2), 334–347.
- Schneider, A. L., & Ingram, H. (1997). *Policy design for democracy*. University Press of Kansas.
- Siagian, Y., Hutahaean, J., Nata, A., & Tarigan, H. S. (2026). Penerapan metode linear regression untuk prediksi pendapatan UMKM kantin sekolah pada Program Makan Bergizi Gratis. *Management of Information System Journal*, 4(3), 69–78. <https://doi.org/10.47065/mis.v4i3.3059>
- Stone, D. (2004). Transfer agents and global networks in the "transnationalization" of policy. *Journal of European Public Policy*, 11(3), 545–566. <https://doi.org/10.1080/13501760410001694291>
- Taylor, J. E., et al. (2025). Rural economy-wide impacts of Kenya's home-grown school meals program. *Food Policy*, 134, 102887. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102887>
- Vermeersch, C., & Kremer, M. (2004). School meals, educational achievement, and school competition: Evidence from a randomized evaluation in Kenya. *World Bank Policy Research Working Paper*.
- Wang, D., Shinde, S., Young, T., & Fawzi, W. W. (2021). Impacts of school feeding on educational and health outcomes of school-age children and adolescents in low- and middle-income countries: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 11, 04051. <https://doi.org/10.7189/jogh.11.04051>
- Weaver, R. K. (2010). Paths and forks or chutes and ladders? Negative feedbacks and policy reversal. *Journal of Public Policy*, 30(2), 137–162.
- Weible, C. M., & Sabatier, P. A. (Eds.). (2018). *Theories of the policy process* (4th ed.). Westview Press.
- World Bank. (2026). *Designing school feeding programs to benefit children and local economies*. World Bank.
- World Food Programme. (2024). *The state of school feeding worldwide 2024*. World Food Programme.